

38 Anggota DPRD Depok Ajukan Mosi Tidak Percaya ke Walkot-Wawalkot

DEPOK (IM) - Sebanyak 38 dari 50 anggota DPRD Kota Depok menyampaikan mosi tidak percaya ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Mosi tersebut ditujukan kepada Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono.

"Mosi tidak percaya kepada Pemerintah Kota, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Ini sedang kita susun bisa interpelasi atau angkat," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok, Ikhravany Hilman saat dihubungi, Selasa (10/5).

Menurut Ikra, ada 38 anggota DPRD Depok yang melayangkan mosi tidak percaya tersebut. Mereka mempertanyakan beberapa program kebijakan serta mekanisme penerapannya.

"Sebanyak 38 anggota, seluruh fraksi selain PKS. Jadi Fraksi Gerindra, PDIP, Golkar, Demokrat, PPP, PAN, PKB-PSI. Artinya, ada beberapa program kebijakan yang kita pertanyakan soal mekanismenya. Kita menggunakan hak DPRD," sambunganya.

Anggota Fraksi PKB-PSI, Babai Suhaimi, mengatakan mosi dilayangkan terkait pelaksanaan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan mutasi aparat sipil negara (ASN).

"Kepada pemerintah pelaksanaan program KDS dan mutasi ASN. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan Komisi D, termasuk juga anggota DPRD secara individu di luar anggota komisi, seperti saya. Men-

getahui sendiri, ada kejanggalan dan ada tindakan tidak transparan serta mempolitisasi program KDS untuk kepentingan partai penguasa," ujar Babai Suhaimi.

Babai menuturkan dugaan pelaksanaan pemberian KDS yang tidak transparan. Selain itu, lanjut dia, jenis kartu yang diadarkan juga sarat akan muatan politis.

"Tidak transparan, contoh satu, di dalam pelaksanaan pemberian KDS itu kepada masyarakat tidak miskin. Kedua, bagi program rumah tidak layak huni itu ditunjuk koordinator lapangan. Satu kelurahan satu orang, tidak pernah dibicarakan oleh siapa pun, dalam hal ini DPRD Komisi D," ungkapnya.

"Jenis kartunya itu bermuatan politis, kartunya warna putih, kemudian ada kombinasi warna oranye dan bergambar Wali Kota. Nah, kita bandingkan dengan beberapa daerah yang telah mengeluarkan program sejenis, jakartalah yang dekat. Tidak ada kartu itu bergambar Gubernur dan Wakil Gubernur," ujar Babai.

Menurutnya, mosi tidak percaya juga ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Depok. Nantinya, 38 anggota tersebut akan mengajukan permintaan ke Badan Kehormatan Dewan.

"Kita akan meminta Ketua DPRD untuk tidak memimpin sidang, bahkan nanti kita serahkan ke Badan Kehormatan Dewan untuk bersidang. Terkait pelanggaran aturan tata tertib DPRD dan kode etik bersidang," pungkasnya. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANT



APRESIASI MITRA BUMN CHAMPION 2022

Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kelima kanan) berfoto bersama dengan penerima penghargaan kategori Global Champion pada acara Apresiasi Mitra BUMN Champion 2022 di Grha Pertamina, Jakarta, Senin (9/5). Menteri BUMN berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi para mitra untuk bekerja sama lebih baik lagi dengan BUMN dan menilai peran mitra tidak bisa dikesampingkan dalam keberhasilan transformasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan BUMN.

Pemprov DKI Jakarta tak Batasi Arus Urbanisasi

Tidak pernah ada pembatasan apalagi larangan orang datang ke Jakarta. Tapi kami meminta kepada para pendatang agar memiliki tujuan yang jelas berada di Jakarta dalam artian sudah memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang pasti, kata Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memastikan tidak akan membatasi arus pendatang (urbanisasi) yang biasanya terjadi setelah libur Lebaran.

"Jadi kami tidak pernah ada pembatasan apalagi larangan orang datang ke Jakarta," kata Ahmad Riza Patria, di Jakarta, Selasa (10/5).

Meski begitu, Riza meminta kepada para pendatang agar memiliki tujuan yang jelas berada di Jakarta dalam artian sudah memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang pasti.

Tak hanya itu, Riza juga

meminta para pendatang untuk memastikan kembali calon tempatnya bekerja agar tidak timbul permasalahan.

"Jangan sampai nanti mendapatkan informasi yang salah lalu datang ke Jakarta sampai di Jakarta tidak mendapatkan pekerjaan seperti yang diharapkan kemudian nanti di Jakarta menjadi pengangguran atau tidak jelas nanti statusnya," ucapnya.

Meski begitu, Riza mengharapkan, tidak semua masyarakat mencari kerja di Jakarta tetapi pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan bisa dilakukan di

kampung halaman sendiri.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta meniadakan operasi yustisi yang biasanya dilaksanakan saat arus balik Lebaran. "Tidak ada operasi yustisi," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Arifin di Jakarta, Rabu (4/5).

Senada dengan Arifin, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, peniadakan operasi yustisi itu karena Jakarta terbuka bagi pendatang.

"Tidak ada operasi yustisi untuk para pendatang ke Jakarta, karena Jakarta milik semua, milik seluruh warga negara Indonesia, siapa saja bisa bekerja di Jakarta," katanya.

Dukcapil DKI, lanjut dia, menyiapkan aplikasi data warga bagi pendatang baru yang tiba di Jakarta dengan melapor kepada RT.

RT, kata dia, akan memasukkan data warga pendatang yang melapor itu melalui aplikasi data warga.

"Atau bisa datang ke loket pelayanan kami di kelurahan atau kecamatan. Selain itu kami juga akan melakukan pelayanan jemput bola ke RW di kelurahan," imbuh Budi.

Operasi Yustisi biasanya diadakan saat arus balik Lebaran dengan sasaran penduduk pendatang tanpa dilengkapi identitas yang jelas atau tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Berdasarkan hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada

2020, jumlah penduduk di Ibu Kota mencapai 10,56 juta jiwa.

Selama 10 tahun terakhir, BPS mencatat terjadi penambahan 954.300 jiwa dibandingkan sensus penduduk pada 2010 atau terjadi laju pertumbuhan 0,92%.

Dari total jumlah penduduk di DKI itu, sebanyak 71,98% adalah penduduk usia produktif yakni 15-64 tahun dan warga lanjut usia 8,59%. Adapun konsentrasi penduduk terbesar ada di Jakarta Timur mencapai 3,04 juta jiwa. ● yan

HARGA PANGAN TAK TURUN USAI LEBARAN

Komisi B DPRD akan Panggil Dinas KPKP dan BUMD DKI Jakarta

JAKARTA (IM) - Harga kebutuhan pokok di DKI Jakarta tak kunjung turun seminggu setelah Idul Fitri 1443 Hijriah berlalu. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan, DPRD akan memanggil Pemprov DKI Jakarta untuk meminta penjelasan terkait melambungnya harga pangan tersebut.

"Kalau ada seperti ini, kami lakukan pemanggilan (untuk) konfirmasi masalahnya seperti apa," kata Ismail saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/5).

Ismail menyatakan akan memanggil Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DKPKP) dan badan usaha milik daerah (BUMD) bidang pangan milik Pemprov DKI. "Biasanya satu paket DKPKP sebagai leading sector, dengan Dharma Jaya, Food Station, dan Pasar Jaya, jadi empat itu," ucap dia. Menurut rencana, Dinas KPKP dan tiga BUMD pangan akan dipanggil pada pekan depan. Tujuannya agar harga pangan bisa segera terkendali. "Mudah-mudahan pekan depan sudah bisa kami jadwalkan," ujar Ismail.

Politikus PKS ini menyebutkan, dalam rapat dengan

Pemprov DKI sebelumnya, Komisi B sudah mengecek stok dan harga bahan pangan. Berdasarkan laporan dari Pemprov DKI, harga relatif stabil dan tidak ada alasan kelangkaan bahan pangan maupun lonjakan harga. Harga yang melambung tinggi hari ini menjadi temuan untuk ditindaklanjuti agar harga pangan kembali stabil di Ibu Kota.

"Berarti ini suatu temuan, nanti akan kami tindak lanjut nanti di rapat. Karena waktu rapat sebelumnya itu daging itu masih dilaporkan masih diperkiraan harga Rp 110.000-Rp 120.000, sekarang di Rp 150.000," kata Ismail.

Sebagai informasi, harga sejumlah pangan masih cukup tinggi di beberapa wilayah DKI Jakarta, khususnya komoditas daging sapi. Berdasarkan informasi di situs web Info Pangan Jakarta, Selasa, harga daging sapi has bagian paha belakang mencapai Rp 180.000 per kilogram di Pasar Tomang Barat dan Pasar Kelapa Gading. Harga telur ayam ras juga rata-rata masih Rp 26.953 per kilogram, ayam boiler Rp 41.023 per ekor, dan harga daging kambing Rp 142.173 per kilogramnya. ● yan

Tanggul Pemecah Ombak Dibangun di Pulau Kelapa

JAKARTA (IM) - Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kepulauan Seribu, membangun tanggul pemecah ombak di sisi utara RT07/02 Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu pada Senin (9/5).

Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Kepulauan Seribu, Hendri, mengatakan, pengecoran tanggul sepanjang 115 meter tersebut untuk menahan hantaman gelombang air laut saat cuaca ekstrem atau rob.

Hendri mengatakan selain untuk menahan abrasi, nantinya tanggul sepanjang 115 meter yang melingkari Pulau Kelapa dapat dijadikan akses bagi wisatawan untuk menikmati keindahan Pulau Kelapa.

"Selain menahan abrasi, tanggul ini sebagai pembatas Pulau Kelapa sekaligus jalan melingkar untuk warga dan wisatawan melintas sambil menikmati keindahan pulau," kata Hendri, Selasa (10/5).

Pengecoran tanggul kubus masif baru ditargetkan rampung pada akhir Mei mendatang.

Adapun perawatan tanggul dengan tinggi lebih dari satu meter menggunakan bahan material semen, pasir dan batu split.

"Pengecoran tanggul kubus masif baru dikerjakan Senin (9/5) dengan target penyelesaian satu bulan atau akhir Mei mendatang," sambunganya. ● yan

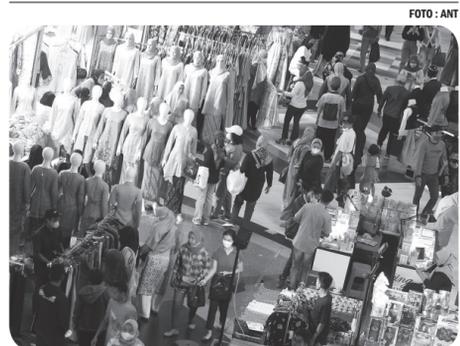


FOTO: ANT

PPKM DI INDONESIA TERUS BERLANJUT

Warga berbelanja di Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa (10/5). Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah tetap akan melanjutkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia hingga pemerintah yakin 100 persen bisa mengendalikan pandemi COVID-19.

CUACA PANAS LANDA DKI

Pemkot Jakbar Imbau Warga tak Bakar Sampah

JAKARTA (IM) - Pemerintah Kota Jakarta Barat mengeluarkan imbauan agar warga tidak membakar sampah saat cuaca panas seperti terjadi di Ibu Kota dalam beberapa hari ke depan.

"Kita imbau untuk mengurangi frekuensi membakar sampah di lingkungan. Kalau bisa sampah dipilah saja jangan dibakar," kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) Jakarta Barat, Sjukri Bahanan, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (10/5).

Menurut Sjukri, membakar sampah dapat menyebabkan api merembet ke bangunan lain melalui perantara dedaunan atau rumput. Terlebih suhu di Jakarta saat ini cukup panas sehingga menyebabkan rumput dan dedaunan menjadi kering dan mudah terbakar.

"Selain itu beberapa warga kalau bakar sampah langsung ditinggal tidak ditunggu. Lama-lama apinya merembet ke rumput dan ilalang," ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau warga agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di atas tumpukan daun atau rumput.

Dia menyoroti fenomena banyaknya pengendara mobil yang membuang puntung rokok ke lahan yang penuh ilalang di pinggir jalan tol.

"Tu kalau asal buang puntung rokok ke pinggir tol bisa terbakar, apa lagi kalau puntungnya masih ada api. Kita imbau untuk lebih berhati-hati," ujar dia.

Sjukri berharap masyarakat bisa mengikuti imbauan tersebut demi terhindar dari musibah kebakaran.

"Kita harap bisa melewati masa panas ini dengan aman dan tidak ada kasus kebakaran," ujarnya. ● yan

Anggota DPRD DKI Keluhkan tak Bisa Pesan Tiket Formula E Lewat Website

JAKARTA (IM) - Organizing Committee Jakarta E Prix resmi menjual tiket Formula E Jakarta 2022 sejak Minggu (1/5). Namun, salah satu anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra, Syarif, mengeluhkan tidak bisa memesan tiket tersebut melalui website.

"Saya sendiri mau pesen pun nggak bisa-bisa tuh, saya coba mesen lewat website nggak bisa, coba aja tuh websitenya," ujar Syarif di kantor DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/5).

Dia mengatakan sudah dimulainya penjualan tiket Formula E adalah tahap yang membanggakan.

"Ya makanya saya bilang tahap yang membanggakan ya yang progresif ticketing itu mungkin membeludak ya makanya sistemnya gitu saya nggak tahu," ucapnya.

Syarif mengaku hanya akan membeli tiket seharga Rp 750 ribu untuk menonton

Formula E. Ini disebabkan gelaran Formula E tersebut tidak akan berlangsung lama, hanya 45 menit.

Kemudian, dia juga mengimbau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mewajibkan para aparat sipil negara (ASN) membeli tiket menonton Formula E. Dia menganggap mewajibkan hal tersebut sama saja dengan mobilisasi ASN.

"Ya jangan sampe seperti itu orang ini buat masyarakat kalau menggunakan ASN mah itu namanya mobilisasi, janganlah. Saya pesan Pak Gubernur jangan ikut mobilisasi gitu," jelasnya.

"Mobilisasi ASN ya kan itu akan berdampak buruk," sambunganya.

Diberitakan sebelumnya, penjualan tiket balapan Formula E yang dihelat pada 4 Juni itu dilakukan melalui portal penjualan daring jakartaeprix.goersapp.com. Harga tiket

yang dibanderol sudah termasuk akses masuk Ancol dan berbagai wahana di dalamnya, termasuk Dunia Fantasi, Sea World, Atlantis, hingga Pantai Festival.

Penonton yang ingin menyaksikan balapan Formula E Jakarta 2022 bisa memilih empat kategori besar, yakni Ancol Festival, Circuit Festival, Grand Stand, serta VIP-VVIP.

Harga tiket paling murah dibanderol Rp 250 ribu untuk kategori Ancol Festival. Sementara itu, yang termahal dipatok dengan harga Rp 10 juta untuk kategori VIP dan VVIP.

Secara keseluruhan ajang balapan Formula E Jakarta 2022 bakal menampung sekitar 60 ribu penonton yang tersebar di berbagai titik lokasi acara. Penjualan tiket dilakukan secara online melalui website jakartaeprixofficial.com dan jakartaeprix.goersapp.com. ● yan



FOTO: ANT

PROGRAM PRIORITAS G20 KEMENKOMINFO

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyampaikan jawaban tentang Presidensi G20 Indonesia saat wawancara dengan Kantor Berita Antara di Jakarta, Selasa (10/5). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengangkat tiga isu prioritas dalam acara Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia yakni konektivitas digital dan pemulihan pasca COVID-19, kecakapan dan literasi digital, dan arus data lintas negara.

PENGUMUMAN

Direksi PT Batanghari Sawit Sejahtera berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan kepada seluruh kreditur Perseroan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 10 Mei 2022 Nomor 4, yang dibuat di hadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Para pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan atas peningkatan modal ditempatkan/disebutkan sebesar Rp120.000.000.000,- menjadi Rp325.000.000.000.000,- sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan/disebutkan sebesar Rp205.000.000.000,- yang diambil dari konversi Uang Muka Sebaran Modal Perseroan kepada PT Bukit Barisan Indah Prima selaku pemegang saham Perseroan, menjadi setoran saham dalam Perseroan.

Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999.

Direksi
PT Batanghari Sawit Sejahtera

PKIT

POOL KONSTRUKSI TERBARUKAN
PT POOL KONSTRUKSI TERBARUKAN
Berkedudukan di Jakarta Selatan
PENGUMUMAN TENTANG
RENCANA PENGAMBILALIHAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (8) UU no. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diberitahukan adanya rencana pengambilalihan 90% (sembilan puluh persen) saham dalam PT Pool Konstruksi Terbarukan yang berkedudukan di kota administrasi Jakarta Selatan beralamat di Jl. Letjen Soepono Blok CC6 No. 23 No. 9-10 Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12210 dari para pemegang saham Perseroan kepada pihak lain.

Maka terhitung mulai hari ini, pihak - pihak yang berkeberatan dengan rencana tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ini. Demikianlah Pengumuman ini kami sampaikan.

Jakarta, 11 Mei 2022
Manajemen,

PT POOL KONSTRUKSI TERBARUKAN